

**A COMPARATIVE STUDY ON THE INDONESIAN GOVERNMENT  
DECISION NOT TO REPATRIATE EX-ISIS MEMBER WITH  
INTERNATIONAL CONVENTIONS**

Author:

Aryasatya<sup>1</sup> and Prof. Edward O.S. Hiariej<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

This legal research is conducted to find the differences of law, regulation, application, and stance of Indonesia with international instrument of law when it comes to facing the issue of the repatriation of ex-ISIS members which has fluctuated due to the dissolving of ISIS.

The research method that will be used in order to conduct this research is comparative normative research where the main focus of the research is the Indonesian law itself which will be compared to the international instrument of law in order to have a better image of Indonesia's position and stance in the whole issue.

According to the research and discussion result, Indonesian's law which are relevant in this issue are mostly adequate. Some of Indonesian law even provides better protection such as when it comes to children and minor. This however, is not the case when it comes to protection of human rights and the deprivation of such rights.

---

<sup>1</sup> Student of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2016)

<sup>2</sup> Lecturer at Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

***Studi Perbandingan Terhadap Keputusan Pemerintah Indonesia Untuk Tidak  
Merepatriasi Eks Anggota Isis Dengan Konvensi Internasional***

Oleh:

Aryasatya<sup>3</sup> dan Prof. Edward O.S. Hiariej<sup>4</sup>

**INTISARI**

*Penelitian hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan perbedaan hukum, peraturan, aplikasi, dan sikap dari pemerintah Indonesia dengan instrument internasional dalam hal menghadapi isu repatriasi dari eks anggota ISIS yang bertambah secara jumlah setelah pembubaran ISIS*

*Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi perbandingan normative dimana hukum Indonesia menjadi focus yang akan di perbandingkan dengan instrumen internasional demi mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai posisi dan sikap Indonesia dalam menghadapi isu tersebut.*

*Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi, hukum Indonesia yang relevan terhadap isu ini cenderung memadai. Beberapa hukum Indonesia bahkan memberikan perlindungan lebih jika dibandingkan dengan instrument internasional seperti perlindungan terhadap anak. Namun, hal ini tidak sedemikian rupa jika berkaca kepada perlindungan hak asasi manusia dan pembatasannya di Indonesia.*

---

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2016)

<sup>4</sup> Pengajar dari Departemen Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**A COMPARATIVE STUDY ON THE INDONESIAN GOVERNMENT DECISION NOT TO REPATRIATE  
EX-ISIS MEMBER WITH  
INTERNATIONAL CONVENTIONS**

ARYASATYA, Edward O.S. Hiariej

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>